

# Evaluasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2024

**<sup>1</sup>Ridho Arifandi, <sup>2</sup>Hendri Koeswara, <sup>3</sup>Desna Aromatic**  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

Korespondensi : ridhoarifandi@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2024, dengan fokus pada potensi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan kunci dan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang besar, tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan strategi pemasaran yang tidak efektif menghambat pengembangan sektor ini. Kesimpulan dari evaluasi ini menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur, peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi, guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat. Pengukuran evaluasi kebijakan RIPPAPROV 2014-2024 melalui pendekatan komprehensif yang mencakup input, process, output, dan outcomes. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan yang tercermin dari peningkatan data kuantitatif seperti jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah, serta aspek kualitatif berupa partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Sumatera Barat.*

**Kata kunci :** Evaluasi Kebijakan, Rencana Induk Pembangunan dan Kepariwisataan Sumatera Barat.

## Abstract

*This study aims to evaluate the 2014-2024 West Sumatra Provincial Tourism Development Master Plan policy, focusing on the potential and challenges faced in its implementation. The method used was descriptive qualitative, involving semi-structured interviews with key stakeholders and documentation analysis to collect relevant data. The results of the study indicate that although West Sumatra has significant tourism potential, challenges such as inadequate infrastructure, lack of collaboration between stakeholders, and ineffective marketing strategies hinder the development of this sector. The conclusion of this evaluation emphasizes the importance of investing in infrastructure, increasing local community involvement, and utilizing digital technology for promotion, in order to create sustainable tourism and provide equitable economic benefits to the community. The evaluation of the 2014-2024 RIPPAPROV policy was measured using a comprehensive approach that includes input, process, output, and outcomes. The evaluation results indicate the success of policy implementation, reflected in the increase in quantitative data such as the number of tourist visits and regional income, as well as qualitative aspects such as active community participation in sustainable tourism development in West Sumatra.*

**Keyword:** Evaluation of West Sumatra's Tourism and Development Master Plan and Policy.

## 1. PENDAHULUAN

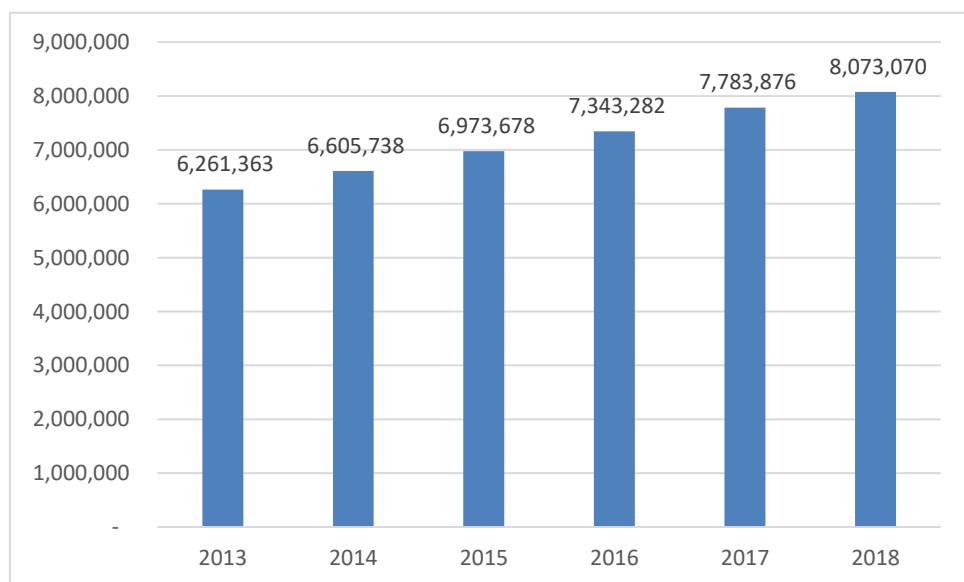
Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pariwisata yang kaya, berkat keindahan alam dan keragaman budaya yang dimilikinya. Pengembangan sektor pariwisata di daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tiga indikator utama yang mempengaruhi keberhasilan pariwisata adalah jumlah wisatawan yang datang, durasi kunjungan, dan transaksi yang dilakukan oleh wisatawan (Saputra & Sukmawati, 2021). Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pariwisata, yang mencakup pengembangan destinasi, pemasaran, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Sidiq, et al., 2023).

Pembangunan pariwisata di Sumatera Barat diarahkan untuk menjadi sektor andalan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, yang telah direvisi, menetapkan tujuan untuk mengoptimalkan pasar pariwisata dan meningkatkan industri pariwisata berbasis agama, budaya, dan lingkungan (Jupir, 2013). Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi antara kebijakan provinsi dan kabupaten/kota. Dari 19 kabupaten/kota, hanya 11 yang telah mengadopsi kebijakan terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, yang dapat menghambat kemajuan pembangunan pariwisata secara keseluruhan (Munawar & Alamanda, 2022).

Penetapan lima tema destinasi wisata di Sumatera Barat, seperti wisata bahari dan wisata budaya, juga belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata (Handono, 2022). Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata di tingkat kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengembangan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

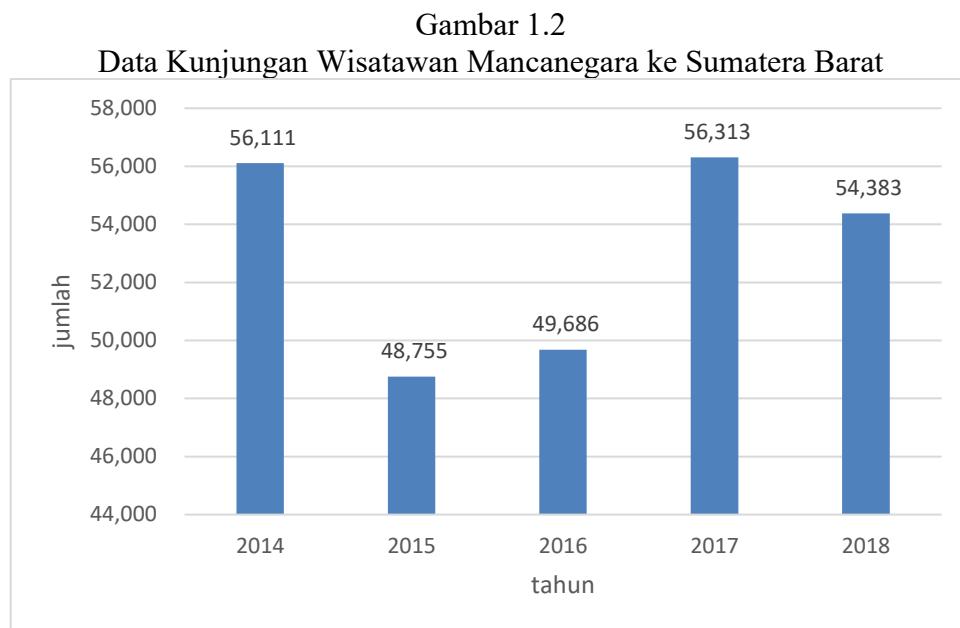
**Gambar 1.1**  
**Data Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sumatera Barat**



*Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan gambar di atas, jelas terlihat bahwa selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya dari 2013 hingga 2018 dengan jumlah kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebanyak 440.594 yang melampaui rata-rata kenaikan jumlah kunjungan dari Tahun 2013-2018 tersebut yang berada pada angka 362.341 orang. Dengan adanya peningkatan setiap tahunnya terkait jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat, hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan kepariwisataan di Sumatera Barat tergolong sukses.

Sementara itu, untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat jika dilihat dari Tahun 2014-2018 bisa dilihat melalui gambar 1.2 dibawah ini :



*Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat*

Lain halnya dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Barat, untuk wisatawan mancanegara terlihat dinamis meskipun terjadi kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan kenaikan dan penurunan kedatangan wisatawan mancanegara masih sulit dijawab. Dari 10 (sepuluh) negara yang jumlah kunjungannya tertinggi ke Sumatera Barat, Malaysia merupakan negara yang paling banyak menghadirkan wisatawan ke Sumatera Barat rentang Tahun 2014-2018. Sementara untuk negara barat, Amerika sebagai negara yang paling banyak menghadirkan penduduknya untuk menikmati wisata di Sumatera Barat.

Meskipun selalu terjadi kenaikan jumlah wisatawan ke Sumatera Barat dari Tahun 2013-2018 khususnya wisatawan nusantara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merasa belum puas dan ingin menyempurnakan kebijakan terkait kepariwisataan ini. Akhirnya pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025. Adanya isu strategis kepariwisataan seperti pariwisata halal, taman bumi, pariwisata berbasis digital dan ekonomi kreatif, penguatan pengalaman melalui atraksi dan desain ruang destinasi wisata sangat mempengaruhi terjadinya perubahan atas kebijakan ini.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi saat ini (Afrizal, 2014). Penelitian deskriptif berfokus pada pengukuran dan pemeriksaan gejala tertentu, serta mengaitkan variabel-variabel yang ada (Yusuf & Yani, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis informasi dari informan terkait permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan informasi (Nurfadilah, et al., 2024). Paradigma post.-positivis yang diterapkan dalam penelitian ini menekankan pada pengumpulan data empiris dan hubungan sebab-akibat, serta mengakui bahwa pengetahuan bersifat dugaan dan tidak pernah absolut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam implementasi kebijakan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat, seperti Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala Dinas Pariwisata. Metode wawancara semi terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan (Meirita, et al., 2021). Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dapat memperkuat hasil wawancara, seperti laporan kegiatan dan dokumen kebijakan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang relevan dalam kebijakan yang diteliti (Djuraid, et al., 2021). Proses penelitian mengikuti langkah-langkah sistematis yang dimulai dari pemilihan masalah, studi pendahuluan, hingga penarikan kesimpulan. Fase perencanaan melibatkan perumusan masalah dan rancangan penelitian, sedangkan fase pelaksanaan mencakup pengumpulan dan analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, pemangku kepentingan, dan proses implementasi kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hudhana & Septriana, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pariwisata di Sumatera Barat, terutama dalam konteks pandemi Covid-19.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi Kebijakan RIPPAPROV Sumatera Barat 2014-2024

Implementasi dan evaluasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2024 merupakan langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama periode tersebut. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan RIPPAPROV untuk periode 2025-2045, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, dan penguatan industri pariwisata. Evaluasi juga mencakup dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, perkembangan destinasi wisata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang telah teridentifikasi, dapat disusun rekomendasi perbaikan dan strategi pengembangan jangka panjang yang lebih efektif, termasuk inovasi produk wisata dan penguatan daya saing pariwisata daerah, sehingga dapat mendukung visi pembangunan pariwisata Sumatera Barat yang berkelanjutan.

##### 3.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pariwisata di Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAPROV) Sumatera Barat 2014-2024. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata yang terintegrasi. Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan lima tema destinasi wisata utama, yaitu destinasi wisata bahari, geopark, ancient Minangkabau, kolonial, dan destinasi wisata lainnya. Fokus utama dari program ini adalah peningkatan kualitas fasilitas pendukung pariwisata, yang terlihat dari peningkatan jumlah rumah makan dan akomodasi yang terjadi antara tahun 2017 hingga 2019.

Dalam aspek kunjungan wisatawan, program promosi dan pemasaran pariwisata menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik yang mencapai puncaknya pada tahun 2019. Meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, angka

kunjungan kembali menunjukkan tren positif pada tahun 2022. Program pengembangan pariwisata juga mencakup pengembangan pariwisata halal, taman bumi, pariwisata berbasis digital, dan ekonomi kreatif, yang sejalan dengan revisi kebijakan RIPPAPROV melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019. Penguatan kelembagaan pariwisata dilakukan melalui koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota, meskipun baru 11 dari 19 kabupaten/kota yang menindaklanjuti kebijakan ini.

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata terus dilakukan, termasuk pengembangan aksesibilitas melalui Bandara Internasional Minangkabau. Data penerbangan menunjukkan peningkatan jumlah penumpang sebelum pandemi, meskipun mengalami penurunan selama masa pembatasan. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga menjadi fokus utama, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Implementasi program pengembangan destinasi wisata juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, dan kenyamanan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Setiap destinasi dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai untuk memastikan kenyamanan pengunjung, termasuk tempat cuci tangan dan penerapan physical distancing. Dalam aspek pemasaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadopsi strategi promosi digital melalui berbagai platform media sosial dan website, yang terbukti efektif dalam menjangkau target pasar yang lebih luas, terutama generasi milenial dan Gen-Z.

Program pengembangan industri pariwisata difokuskan pada penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, di mana pelaku usaha didorong untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang mencerminkan keunikan budaya Minangkabau. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi yang melibatkan kerjasama dengan institusi pendidikan. Selain itu, implementasi konsep smart tourism menjadi salah satu inovasi dalam pengembangan destinasi wisata, dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan destinasi dan sistem informasi pariwisata terintegrasi.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur. Program ini mencakup pelatihan keterampilan teknis seperti hospitality, kuliner, dan guiding, serta pengembangan soft skills seperti kemampuan bahasa asing, digital marketing, dan manajemen bisnis pariwisata.

*"Pengembangan pariwisata Sumatera Barat harus memperhatikan keseimbangan antara nilai ekonomi dan pelestarian budaya. Kita tidak bisa hanya mengejar angka kunjungan wisatawan, tapi juga harus memastikan bahwa nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tetap terjaga,"* tegas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Sumatera Barat tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. Dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengintegrasikan konsep pariwisata halal ke dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAPROV). Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi wisatawan Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bukittinggi belum memiliki regulasi pariwisata halal yang lengkap, kota ini telah memenuhi kriteria yang baik dalam pengembangan pariwisata halal, termasuk penyediaan fasilitas akomodasi dan kuliner yang ramah (Wibowo, 2020). Pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan dari kalangan Muslim, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata yang inklusif.

Selain itu, pengembangan geopark di Sumatera Barat menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan daya tarik wisata. Geopark tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan konservasi warisan geologi. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, geopark diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sambil menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun referensi yang ditemukan tidak secara langsung membahas geopark di Sumatera Barat, konsep UNESCO Global Geoparks menekankan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan pengembangan berkelanjutan yang relevan dengan konteks (Fathurrozi & Kustanto, 2023). Dengan mempromosikan nilai-nilai geologi dan budaya, pengembangan geopark dapat menarik perhatian wisatawan yang mencari pengalaman edukatif dan unik, sekaligus mendukung pelestarian warisan alam dan budaya setempat.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga ditekankan dalam berbagai program yang dilaksanakan. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, mulai dari penyediaan akomodasi hingga pengembangan atraksi berbasis budaya. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan pariwisata sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya (Panjaitan, et al., 2023). Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan pengembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

Pengembangan pariwisata di Sumatera Barat juga berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, pemerintah berupaya meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pelaku industri pariwisata. Program ini mencakup pelatihan teknis seperti *hospitality*, kuliner, dan *guiding*, serta pengembangan soft skills seperti kemampuan bahasa asing dan digital marketing. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan sektor pariwisata dapat beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada wisatawan. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks persaingan global yang semakin ketat di sektor pariwisata.

Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan partisipasi lokal dan memberdayakan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata, mulai dari penyediaan akomodasi hingga pengembangan atraksi berbasis budaya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan pariwisata sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Dengan memberdayakan masyarakat, pengembangan pariwisata diharapkan dapat menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Dalam konteks keberlanjutan, pemerintah juga menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Ekowisata bertujuan untuk melestarikan lingkungan sambil memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi, pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama. Hal ini sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Akhirnya, untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Public-private partnership (PPP) dapat menjadi model yang efektif dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pariwisata (DJABBARI, 2024). Melalui kerjasama yang saling menguntungkan, diharapkan dapat tercipta sinergi dalam pengembangan produk wisata, promosi bersama, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.1.2 Pencapaian Target dan Sasaran

Evaluasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2024 merupakan suatu upaya strategis untuk mencapai target dan sasaran dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata sangat penting untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pengunjung (Asri et al., 2022).

Salah satu aspek kunci dalam evaluasi ini adalah pengembangan produk wisata yang beragam dan berkualitas. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengembangan objek daya tarik wisata yang sesuai dengan karakteristik lokal dapat meningkatkan daya tarik wisatawan (Rizkiyana, 2023). Misalnya, pengembangan Desa Wisata Darmasaba di Bali menunjukkan bahwa desain ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Oleh karena itu, penting bagi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sumatera Barat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah tersebut.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan pariwisata juga menjadi faktor penting dalam mencapai target yang ditetapkan. Inovasi ini mencakup pengembangan sistem informasi yang efisien dan penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan destinasi wisata (Maulana, 2022). Dengan memanfaatkan teknologi, pengelola pariwisata dapat menjangkau lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pengalaman mereka. Misalnya, pelatihan pemasaran virtual untuk kelompok sadar wisata di Mojokerto menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Evaluasi terhadap kebijakan yang ada juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua rencana dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan evaluasi yang komprehensif, yang melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan, evaluasi yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pengembangan pariwisata di masa depan.

Pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata juga menjadi bagian penting dari Rencana Induk ini. Infrastruktur yang baik, seperti akses jalan, fasilitas akomodasi, dan layanan publik, sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperpanjang durasi tinggal mereka di suatu daerah.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai fasilitator dan pengatur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut.

Evaluasi terhadap pencapaian target dan sasaran dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika yang ada di lapangan. Dengan melakukan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan pariwisata yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan

harapan wisatawan. Dengan demikian, pencapaian target dan sasaran dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat terwujud dengan lebih optimal.

### 3.1.3 Kendala dalam Implementasi

Kendala dalam implementasi Evaluasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2024 merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana ini dapat menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi yang lemah antara pihak-pihak ini dapat mengakibatkan terhambatnya pengembangan infrastruktur dan layanan yang diperlukan untuk mendukung pariwisata (Asy'ari et al., 2021).

Selanjutnya, masalah pendanaan juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi rencana ini. Banyak program yang direncanakan memerlukan investasi yang besar, namun sering kali anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Hal ini dapat disebabkan oleh prioritas anggaran yang berbeda di tingkat pemerintah daerah, di mana sektor lain mungkin lebih diutamakan dibandingkan dengan pengembangan pariwisata (Palupi et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketidakcukupan dana dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek penting yang seharusnya mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam sektor pariwisata. Kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan sangat bergantung pada kompetensi tenaga kerja di bidang ini. Namun, di Sumatera Barat, masih terdapat kekurangan dalam pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Aspek regulasi dan kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi rencana ini. Terkadang, terdapat tumpang tindih regulasi yang membingungkan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini dapat menghambat investasi dan pengembangan usaha pariwisata yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi dan peningkatan transparansi dalam proses perizinan dapat membantu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan pariwisata.

Selain itu, tantangan dalam pemasaran dan promosi destinasi wisata juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun Sumatera Barat memiliki banyak potensi wisata, namun kurangnya strategi pemasaran yang efektif dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan (Prakoso, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata, tetapi hal ini masih kurang dimanfaatkan secara optimal di daerah ini.

Kendala lingkungan juga tidak dapat diabaikan dalam konteks pengembangan pariwisata. Isu-isu seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat berdampak negatif terhadap daya tarik destinasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Tantangan dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal juga menjadi kendala dalam implementasi rencana ini. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan

program-program pariwisata dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini agar Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuannya.

Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Sumatera Barat menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, hanya 11 daerah yang telah mematuhi kebijakan RIPPARDA masing-masing. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengkoordinasikan pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi, yang penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang holistik dan menarik bagi pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menegaskan, "Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah belum optimalnya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam implementasi RIPPARPROV."

Kendala lain yang signifikan adalah komitmen daerah dalam membangun sektor pariwisata. Meskipun pariwisata memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah, tidak semua kabupaten/kota menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang terbatas untuk pengembangan pariwisata, yang berdampak pada lambatnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Ketua PHRI Sumatera Barat menyatakan,

*"Banyak pelaku usaha pariwisata yang terpaksa menutup usahanya atau beroperasi terbatas. Ini berdampak serius pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata."*

Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata juga menjadi masalah serius. Banyak destinasi wisata yang masih sulit diakses karena kondisi jalan yang tidak memadai, serta minimnya fasilitas seperti toilet umum, area parkir, dan pusat informasi wisata. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan,

*"Infrastruktur pendukung pariwisata masih menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata di Sumatera Barat."*

Kondisi ini berdampak langsung pada kenyamanan dan kepuasan wisatawan, sehingga menghambat potensi pengembangan destinasi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap penerapan RIPPARPROV. Pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan menyebabkan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Banyak usaha pariwisata yang terpaksa tutup atau beroperasi secara terbatas, yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Selain itu, tantangan dalam aspek sumber daya manusia juga menjadi kendala, dengan kesenjangan kompetensi dalam penguasaan bahasa asing dan pemasaran digital yang masih terlihat.

Koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Meskipun telah ada forum koordinasi pariwisata, praktiknya masih terdapat ego sektoral dan tumpang tindih program antara berbagai instansi. Hal ini menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan pariwisata secara optimal. Keterbatasan sistem informasi dan database pariwisata yang terintegrasi juga menyulitkan proses monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis data.

Tantangan dalam pelestarian budaya dan lingkungan juga menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Beberapa destinasi wisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya nilai-nilai budaya lokal akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian alam serta budaya masih menjadi tantangan besar dalam implementasi RIPPARPROV. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi

dan pengawasan yang konsisten untuk memastikan aktivitas pariwisata tidak merusak keaslian budaya dan kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif dan terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan komitmen daerah, serta mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia, diharapkan RIPPAPROV dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

### **3.2 Evaluasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2024**

Evaluasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2024 merupakan proses penting yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut. Rencana Induk ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Sumatera Barat, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi destinasi wisata. Dalam evaluasi ini, berbagai indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk jumlah kunjungan wisatawan, tingkat kepuasan pengunjung, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Selain itu, evaluasi juga mencakup analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi, seperti kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang belum memadai. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, sehingga pengembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks evaluasi ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai dampak kebijakan yang telah diterapkan. Keterlibatan masyarakat lokal sangat krusial, mengingat mereka adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dari pengembangan pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, diharapkan dapat teridentifikasi potensi dan tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh pihak pemerintah atau pelaku industri. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu dalam mengadaptasi kebijakan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk perubahan tren wisata dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, Evaluasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2024 tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai pencapaian, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan strategis yang lebih baik di masa depan.

#### **3.2.1 Rencana Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat**

Rencana Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di daerah ini dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pengembangan kualitas layanan dan pengalaman wisata yang ditawarkan. Dengan mempertimbangkan tren global dan kebutuhan pasar, rencana ini diharapkan dapat menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu aspek penting dalam penyusunan kebijakan ini adalah analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata di Sumatera Barat. Hal ini mencakup identifikasi objek daya tarik wisata yang ada, seperti keindahan alam, budaya lokal, dan warisan

sejarah, serta penilaian terhadap infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya, seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2014-2024, juga menjadi bagian integral dari proses ini. Dengan memahami apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, penyusunan kebijakan baru dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat serta pelaku industri pariwisata.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan kepariwisataan ini. Melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif, diharapkan dapat tercipta kesepakatan bersama mengenai visi dan misi pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengembangan destinasi wisata.

Dalam rencana penyusunan kebijakan ini, aspek keberlanjutan menjadi fokus utama. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan harus mencakup strategi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan terhadap budaya lokal. Selain itu, penting untuk mengembangkan produk wisata yang ramah lingkungan dan mendukung pelestarian budaya, sehingga pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Implementasi dari Rencana Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 harus diikuti dengan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan adanya sistem ini, pemangku kepentingan lainnya dapat memantau kemajuan yang dicapai, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Monitoring yang berkelanjutan juga akan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, rencana ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi panduan dinamis yang mampu menjawab tantangan dan peluang yang ada di sektor pariwisata Sumatera Barat dalam dua dekade mendatang.

Rencana Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu langkah awal yang penting adalah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur yang ada saat ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap daya tarik suatu destinasi wisata (Hesna et al., 2017). Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan, perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi jalan, aksesibilitas, serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. Dengan memperbaiki infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperpanjang durasi tinggal mereka di Sumatera Barat.

Selanjutnya, kebijakan ini juga harus memperhatikan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor ini dapat dirasakan oleh semua pihak (Sidiq et al., 2023). Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta program-program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, pengembangan objek wisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi wisata, serta mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan.

Aspek digitalisasi juga menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan kepariwisataan ini. Pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran destinasi wisata dapat membantu menjangkau pasar yang lebih luas, terutama wisatawan mancanegara. Meskipun referensi yang ada tidak secara langsung membahas Sumatera Barat, pentingnya digitalisasi dalam sektor pariwisata telah diakui secara luas (Nugrahaningsih & Olifiani, 2023). Oleh karena itu, kebijakan ini harus mencakup pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses informasi tentang destinasi, akomodasi, dan layanan lainnya. Dengan demikian, digitalisasi dapat meningkatkan daya saing pariwisata Sumatera Barat di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, kebijakan ini juga harus menekankan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang tidak terkendali dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan hilangnya nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan, perlu ada regulasi yang ketat mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi bagi wisatawan dan masyarakat, serta penerapan praktik pariwisata yang ramah lingkungan. Dengan menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, Sumatera Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan.

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus diintegrasikan dalam Rencana Penyusunan Kebijakan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Monitoring yang berkelanjutan akan membantu dalam mengidentifikasi kemajuan yang dicapai, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya data yang akurat dan real-time, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan (Hesna et al., 2017). Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data terkait pariwisata, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar.

### 3.2.2 Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Strategi pengembangan destinasi pariwisata merupakan suatu pendekatan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan daya tarik, aksesibilitas, dan kualitas layanan di suatu lokasi wisata. Dalam konteks ini, strategi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif, yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan destinasi pariwisata yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan saling mendukung.

Salah satu langkah awal dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata adalah melakukan analisis potensi dan karakteristik lokal. Ini mencakup identifikasi objek daya tarik wisata yang ada, seperti keindahan alam, budaya, sejarah, dan atraksi unik lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang potensi lokal dapat membantu dalam merancang produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan (Asri et al., 2022). Selain itu, analisis ini juga harus mempertimbangkan tantangan yang ada, seperti infrastruktur yang belum memadai, masalah lingkungan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Setelah potensi dan tantangan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan visi dan misi pengembangan destinasi. Visi ini harus mencerminkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Dalam proses ini, penting untuk melibatkan masyarakat lokal agar mereka merasa memiliki dan berkontribusi terhadap pengembangan destinasi. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut.

Pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat berpengaruh terhadap pengalaman wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa destinasi dengan infrastruktur yang memadai cenderung memiliki tingkat kunjungan yang lebih tinggi dan durasi tinggal yang lebih lama (Rizkiyana, 2023). Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur harus menjadi prioritas dalam rencana pengembangan destinasi pariwisata.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi kunci dalam strategi pengembangan destinasi. Pelatihan dan pendidikan bagi pelaku industri pariwisata, termasuk pemandu wisata, pengelola hotel, dan penyedia layanan lainnya, sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan. Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, sehingga SDM yang dihasilkan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional (Rizkiyana, 2023). Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan menciptakan pengalaman yang positif.

Promosi dan pemasaran destinasi juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam strategi pengembangan pariwisata. Penggunaan media digital dan platform sosial dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas destinasi. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang efektif dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkuat citra destinasi di pasar global dianggap penting untuk merancang kampanye pemasaran yang menarik dan inovatif, yang dapat menarik perhatian wisatawan potensial.

Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan harus diintegrasikan dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata. Dengan adanya sistem monitoring yang efektif, pemangku kepentingan dapat memantau kemajuan yang dicapai, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, sehingga destinasi pariwisata dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan harapan wisatawan (Maulana, 2022). Dengan pendekatan yang komprehensif dan terencana, diharapkan pengembangan destinasi pariwisata dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

### 3.3 Pengukuran Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Pengukuran evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata, khususnya dalam konteks Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2024, merupakan suatu proses yang krusial untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana induk tersebut tercapai, serta untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Dalam melaksanakan evaluasi ini, berbagai metode dan indikator perlu digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja kebijakan. Misalnya, indikator kuantitatif seperti jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata, dan tingkat partisipasi masyarakat lokal dapat digunakan untuk mengukur dampak ekonomi, sedangkan indikator kualitatif seperti kepuasan wisatawan dan persepsi masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek sosial dan budaya (Janwar et al., 2023).

Pengukuran evaluasi kebijakan ini juga harus mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Faktor-faktor seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan promosi destinasi wisata menjadi elemen penting yang perlu dievaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur yang memadai dan aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata (Astari & Rochman, 2023). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat

penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hasil dari pengukuran evaluasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan pariwisata di masa mendatang. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, serta mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing pariwisata Sumatera Barat. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan akan membantu dalam mengidentifikasi peluang baru dan tantangan yang mungkin muncul, sehingga pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi (Sari, et al., 2020). Dengan demikian, pengukuran evaluasi kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.

## Input

Input dalam konteks evaluasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat 2014-2024 mencakup berbagai sumber daya, data, dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi. Ini termasuk data statistik mengenai kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata, serta informasi tentang infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di destinasi wisata. Selain itu, input juga mencakup dokumen kebijakan yang relevan, laporan sebelumnya, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pengumpulan data ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi awal sebelum kebijakan diterapkan, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan berbasis bukti (Janwar et al., 2023).

*"Dalam melakukan evaluasi RIPPAPROV 2014-2024, kami membutuhkan data yang komprehensif dari berbagai aspek. Mulai dari statistik kunjungan wisatawan, pendapatan sektor pariwisata, hingga kondisi infrastruktur di destinasi wisata. Semua ini menjadi input penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang telah dijalankan selama 10 tahun terakhir."* (Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat).

Proses evaluasi RIPPAPROV 2014-2024 memerlukan berbagai sumber data sebagai input untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Data-data tersebut tidak hanya mencakup aspek kuantitatif seperti statistik kunjungan dan pendapatan, tetapi juga meliputi dokumen kebijakan terkait, laporan-laporan sebelumnya, serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan berbasis bukti, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengembangan pariwisata Sumatera Barat ke depannya.

Pengumpulan input yang komprehensif dan beragam ini akan menjadi dasar yang kuat untuk proses evaluasi selanjutnya. Dengan adanya data yang akurat dan informasi yang relevan, evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi yang berbasis pada data dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menciptakan kebijakan pariwisata yang lebih responsif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat (Syahbudin, et al., 2021).

## Process

Proses evaluasi kebijakan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat melibatkan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Langkah pertama dalam proses ini adalah pengumpulan dan analisis data yang telah diidentifikasi sebelumnya. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode statistik dan

kualitatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang relevan. Selain itu, proses ini juga melibatkan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana induk, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil (Astari & Rochman, 2023).

Setelah analisis data dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan-temuan utama, analisis, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan transparan, sehingga dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu, proses ini juga melibatkan presentasi hasil evaluasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan cara ini, proses evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Yakup & Haryanto, 2021).

*"Proses evaluasi RIPPAPROV membutuhkan tahapan yang sistematis dan terukur. Kami melakukan analisis mendalam terhadap semua data yang terkumpul, membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi gap atau kesenjangan yang ada. Hal ini membantu kami dalam merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran."*

Pelaksanaan evaluasi RIPPAPROV 2014-2024, proses yang dilakukan mencakup serangkaian tahapan yang saling terkait. Dimulai dari pengumpulan data komprehensif, dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode statistik dan kualitatif untuk mengidentifikasi tren dan pola yang ada. Proses evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif seperti dampak sosial-budaya dan keberlanjutan pariwisata. Seluruh temuan kemudian dituangkan dalam laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan ke depan.

Sedangkan menurut Kabid Pengembangan Daya Tarik Wisata:

*"Dalam melaksanakan proses evaluasi, kami tidak hanya mengandalkan data-data formal, tetapi juga aktif melibatkan masukan dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Proses partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan dan kebutuhan nyata dari seluruh pemangku kepentingan."*

Pernyataan dari Kabid Pengembangan Daya Tarik Wisata tersebut menekankan pentingnya pendekatan evaluasi yang inklusif dan partisipatif dalam proses evaluasi RIPPAPROV 2014-2024. Beliau menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya bertumpu pada data-data formal atau statistik semata, tetapi juga mempertimbangkan masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata. Pendekatan ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang kondisi aktual di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan riil dari semua pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Dengan melibatkan berbagai perspektif ini, hasil evaluasi diharapkan dapat lebih mencerminkan realitas yang ada dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

## Outputs

Outputs dari evaluasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat mencakup berbagai hasil yang dapat diukur dan dilaporkan. Salah satu output utama adalah laporan evaluasi yang menyajikan temuan dan analisis mengenai kinerja kebijakan yang telah diterapkan. Laporan ini harus mencakup data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung kesimpulan yang diambil, serta rekomendasi yang jelas untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, output juga dapat berupa presentasi hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai dampak kebijakan (Sari, et al, 2020). Output lainnya adalah pengembangan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pariwisata secara berkelanjutan. Indikator ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepuasan wisatawan, pertumbuhan pendapatan dari sektor pariwisata, dan dampak sosial ekonomi terhadap

masyarakat lokal. Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan evaluasi secara berkala dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan (Rustum & Aisyah, 2022).

Kabid Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Sumatera Barat:

*"Output dari evaluasi RIPPAPROV tidak hanya menghasilkan laporan formal, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas program yang telah dijalankan. Kami menggunakan berbagai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan, mulai dari pertumbuhan ekonomi kreatif, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga berkembangnya usaha-usaha kreatif di sektor pariwisata."*

Proses evaluasi RIPPAPROV 2014-2024 menghasilkan beberapa output penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan. Output tersebut tidak hanya berupa laporan evaluasi yang komprehensif, tetapi juga mencakup rekomendasi konkret untuk perbaikan kebijakan pariwisata. Laporan ini dilengkapi dengan data-data kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan pencapaian program, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangan yang dapat dioptimalkan di masa mendatang.

Output evaluasi juga mencakup pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan melalui penetapan indikator kinerja yang terukur. Indikator-indikator ini dirancang untuk memantau berbagai aspek pembangunan pariwisata, mulai dari pertumbuhan kunjungan wisatawan, peningkatan kualitas destinasi wisata, hingga dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal. Dengan adanya sistem monitoring yang efektif, pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menanggapi perubahan dan kebutuhan sektor pariwisata, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

## Outcomes

Outcomes dari evaluasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat mencakup perubahan yang terjadi sebagai hasil dari implementasi kebijakan dan evaluasi yang dilakukan. Salah satu outcome yang diharapkan adalah peningkatan kualitas destinasi wisata di daerah tersebut, yang dapat diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan kepuasan pengunjung. Dengan adanya kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengunjung, diharapkan sektor pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Selain itu, outcome lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data dan analisis dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal ini dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya lokal dan pelestarian lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, outcomes dari evaluasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas (Rahmawati, 2022). Selain itu, outcome lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data dan analisis dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal ini dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya lokal dan pelestarian lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, outcomes dari evaluasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat:

*"Dalam perspektif outcomes, evaluasi RIPPAPROV telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Tidak hanya dalam hal peningkatan jumlah kunjungan dan pendapatan daerah, tetapi juga dalam aspek pemberdayaan masyarakat lokal. Kami melihat bagaimana masyarakat semakin sadar akan*

*potensi pariwisata di daerahnya dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaannya. Ini adalah outcome jangka panjang yang sangat berharga bagi keberlanjutan sektor pariwisata di Sumatera Barat."*

Evaluasi RIPPAPROV 2014-2024 telah menghasilkan berbagai outcomes positif yang mencakup berbagai aspek pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Outcomes ini tidak hanya tercermin dari meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga terlihat dari penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat lokal semakin terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan pelestarian lingkungan. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat ini menjadi indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menjadi modal sosial yang berharga untuk pengembangan pariwisata di masa mendatang.

#### 4. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar dalam sektor pariwisata, tantangan signifikan masih menghambat implementasinya. Keterlibatan masyarakat lokal dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Selain itu, infrastruktur yang memadai dan strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan pengalaman wisatawan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan dan penggunaan teknologi digital dalam promosi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif yang melibatkan semua pihak terkait. Pengukuran evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata di Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif meliputi input, process, output, dan outcomes. Proses evaluasi ini tidak hanya menghasilkan data kuantitatif seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah, tetapi juga mencakup aspek kualitatif seperti partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

#### 5. SARAN

Pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat mencakup beberapa langkah strategis yang harus diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. Pertama, perlu dilakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya, karena penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik berpengaruh langsung terhadap pengalaman wisatawan dan tingkat kunjungan. Selain itu, penting untuk mengembangkan produk wisata yang beragam dan berkualitas, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan destinasi, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan pelestarian budaya tetap terjaga. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan promosi destinasi harus ditingkatkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama wisatawan mancanegara, dengan mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang memudahkan akses informasi. Terakhir, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam implementasi kebijakan, sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (p. 139). Jakarta: Rajawali Pers.
- [2]. Asri, S., Setiawan, H., & Krisnawansyah, Y. (2022). Kebijakan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif sumatera barat menghadapi global village. *Menara Ilmu*, 16(2). [https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3796](https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3796)
- [3]. Astari, W. Y. &, & Rochman, G. P. (2023). Hubungan timbal balik antar aktor dalam pengembangan wisata budaya keraton kota cirebon. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1950>
- [4]. Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di provinsi jawa barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292>
- [5]. Djuraid, D. A., Najah, A. N., Sholiha, I. M., & Agustin, N. (2021). Ritus budaya tingkeban sebagai perekat sosial pada masyarakat jember. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 21(1), 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/pjiiib.2021.v21.i01.p02>
- [6]. Fathurrozi, A. &, & Kustanto, P. (2023). Sosialisasi bayah geopark untuk menjadi unesco global geoparks (ugg) pada komunitas geopark youth forum (gyf). *Jurnal Dharmabakti Nagri*, 1(2), 91–99.
- [7]. Handono, W. S. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada masa pandemi corona virus diesease 2019 di provinsi bali. *Jurnal Widya Publika*, 10(1), 41–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.70358/widyapublika.v10i1.864>
- [8]. Hesna, Y., Suraji, A., Istijono, B., Hidayat, B., & Ophyandri, T. (2017). Kajian kapasitas infrastruktur : suatu upaya peningkatan pariwisata sumatera barat. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3178>
- [9]. Hudhana, W. D. &, & Septriana, H. (2022). Muatan level kognitif dalam soal penugasan mata kuliah umum bahasa indonesia di universitas muhammadiyah tangerang. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(3), 203. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/lgrm.v11i3.7295>
- [10]. Janwar, A. M., Tan, R., Sutisna, E., Herlina, A. F., Sarikuswati, S., Sulaiman, Z., & Iwan, D. S. (2023). Penguatan peran masyarakat melalui pengembangan pariwisata geopark di desa ridogalih. *Jurnal Abdi Nusa*, 3(3), 193–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/abdinusa.v3i3.86>
- [11]. Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di kabupaten manggarai barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2013.001.01.05>
- [12]. Maulana, A. (2022). Peran kementerian/lembaga negara untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2916>
- [13]. Meirita, S., Suka, R. G., & Saputri, A. H. (2021). Transformasi sastra lisan syaer dalam pertunjukan tari. *Griya Cendikia*, 6(2), 371–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/griyacendikia.v6i2.197>
- [14]. Munawar, I. F. &, & Alamanda, D. T. (2022). Sikap masyarakat terhadap aplikasi pedulilindungi menggunakan multiatribut fishbein. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i2.132>
- [15]. Nugrahaningsih, N. &, & Olifiani, L. P. (2023). Optimasi diplomasi digital sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara di kalimantan barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 160. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.9>

- [16]. Nurfadilah, A., Suntoko, S., & Suprihatin, D. (2024). Nilai moral dalam novel laut bercerita karya leila s. chudori. *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 7(1), 199–206. [https://doi.org/https://doi.org/10.33503/alfabeta.v7i1.3984](https://doi.org/10.33503/alfabeta.v7i1.3984)
- [17]. Palupi, T. M., Mayuni, I., Agustina, I. W., & Pieter, P. (2023). Pengembangan program ‘kampung inggris’: upaya mendukung pariwisata di kabupaten agam sumatera barat. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 178–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/abdi.v5i2.425>
- [18]. Panjaitan, M., Harahap, R. H., & Munthe, H. M. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata desa kuta jungak kecamatan siempat rube kabupaten pakpak bharat provinsi sumatera utara. *Perspektif*, 12(1), 171-184. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8108>
- [19]. Prakoso, A. A. (2016). Dampak multiganda rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (ripparda) terhadap kepariwisataan di daerah istimewa yogyakarta. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, 10(1), 1-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.47256/kepariwisataan.v10i01.129>
- [20]. Rahmawati, L. (2022). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Sumatera Barat. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*.
- [21]. Rizkiyana, E. M. T. (2023). Pengembangan potensi pemandian alam cikoromoy sebagai objek daya tarik wisata di kabupaten pandeglang. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 335–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.170>
- [22]. Rustam, D. &, & Aisyah, S. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota sumatera barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Pundi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.405>
- [23]. Saputra, D. D. &, & Sukmawati, A. (2021). Pendekatan analisis vector error correction model (vecm) dalam hubungan pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 120–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.787>
- [24]. Sari, T., Selamet, K., & Purnami, S. (2020). Analisis swot dalam pengembangan agrowisata di desa pelaga kecamatan petang kabupaten badung. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(1), 1-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/we.19.1.1575.1-9>
- [25]. Sidiq, R. S. S., Sugiyanto, S., & Firmansyah, Y. (2023). Pemberdayaan berbasis kolaborasi dalam penataan fisik dan sumber daya manusia di bendungan sungai paku. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 525–536. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/linov.v8i3.1430>
- [26]. Syahbudin, S., Effendy, K., & Kusworo, K. (2021). Strategi pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten bangka. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2238>
- [27]. Wibowo, M. G. (2020). Indeks pariwisata halal (implementasi fatwa dsn mui tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di kota bukittinggi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 84. [https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).](https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).)
- [28]. Yakup, A. P. &, & Haryanto, T. (2021). Pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>
- [29]. Yusuf, M. &, & Yani, J. (2023). Afiksasi pembentuk makna pada karangan teks biografi karya siswa kelas x smkn 3 tangerang. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12(2), 83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/lgrm.v12i2.8646>.